



FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TATA KELOLA UNIVERSITAS NEGERI PADANG DALAM MENCAPAI *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE* (GUG)

Putri, Zikri Alhadi

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Email : putrip0502@gmail.com

Abstrak

Tujuan artikel ini ialah untuk mendeskripsikan temuan penelitian berupa faktor penghambat dan faktor pendukung tata kelola Universitas Negeri Padang dalam mencapai good university governance, peneliti menggambarkan bagaimana keterlaksanaan tata kelola dalam mencapai tata kelola perguruan tinggi yang baik. Selanjutnya tujuan penelitian ialah untuk melihat tata kelola UNP serta faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan tata kelola Universitas Negeri Padang dalam mencapai good university governance. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan jenis kualitatif dengan metode deskriptif yang menggunakan teknik purposive sampling dalam pemilihan informan. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Sesuai dengan hasil penelitian terlihat bahwa tata kelola UNP dalam mencapai good university governance (GUG) di pencapaiannya dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Kemudian ditarik kesimpulan substantif bahwa secara spesifik pelaksanaan tata kelola UNP pada dasarnya untuk menjalankan dan mencapai tujuan pengelolaan tidak memiliki faktor penghambat yang begitu besar. Hanya hal-hal dasar, namun dalam pelaksanaannya di UNP masih belum dikelola secara maksimal sehingga memberi pengaruh yang besar terhadap tata kelola dalam mencapai good university governance (GUG).

Kata kunci: Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat, *Good University Governance*.



Pendahuluan

Sistem pendidikan nasional merupakan sebuah sistem utuh dalam menyelenggarakan pendidikan nasional bagi negara berlandaskan pada Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kemudian secara terperinci dimaktubkan pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sidiknas, 2003).

Menanggapi amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yakni Nomor 20 tahun 2003 menjadi payung yuridis terbentuknya Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Nomor 12 tahun 2012 sebagai bagian dari satu kesatuan tata kelola. Pendidikan tinggi diartikan dengan tingkatan pendidikan yang melingkupi program diploma; program sarjana; program magister; program doktor; dan program profesi; termasuk program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia

Seiring dengan perkembangan zaman setiap negara diharuskan memiliki kualitas terutama dalam persoalan sumber daya manusianya. Wisnumurti, AAGO., (2017) menguraikan bahwa pendidikan tinggi memiliki peran besar terlebih dalam memberikan kontribusi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) terutama dalam membantu menyiapkan sumber daya manusia unggul dan kompeten sebagai upaya pengembangan bagi masyarakat. Artinya pendidikan tinggi senantiasa berkenaan dengan tata kelola terhadapnya.

Menurut Suti, M., Syahdi, M.Z., dan D., Didiharyono (2020) tantangan yang semakin kompleks serta perubahan yang begitu cepat untuk mengantisipasi dinamika pembelajaran besar wajib memperjuangkan seluruh metode dalam tingkatkan energi saing alumnus yang mempunyai softskill serta kompetensi alhasil jadi angka imbuh dikala diperoleh di bumi kegiatan. Untuk menjawab tuntutan zaman pendidikan tinggi menjadi salah satu solusi dan sumber inovasi untuk pengembangan bagi pertumbuhan bangsa. Sebagai solusi dan sumber inovasi dalam meningkatkan SDM maka perguruan tinggi perlu meningkatkan mutu tata kelolanya menjadi lebih terencana.

Tata kelola perguruan tinggi adalah persoalan pendidikan tinggi yang termasuk menjadi isu penting karena kerap kali dikaitkan dengan isu komersialisasi, privatisasi, dan sebagainya. Konsep di atas sejalan dengan uraian yang dikemukakan oleh Zulfikar, A.,(2017) yang berkenaan dengan dampak komersialisasi terhadap tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia membawakan pendapat Derek Bok sehingga ia menarik kesimpulan meskipun komersialisasi pendidikan pada dasarnya mendatangkan keuntungan keuangan bagi penyelenggara pendidikan tinggi namun lambat laun dampaknya akan terasa dalam proses tata kelola pendidikan tinggi. Akibat beberapa kerugian yang harus dibayar atas pilihan menjalankan komersialisasi pendidikan, melingkupi kerugian atas: komersialisasi bisa merongrong standar akademik; komersialisasi dapat merongrong antusias kolegialitas, keyakinan di antara badan komunitas akademik; pula komersialisasi bisa mengganggu pandangan universitas di mata khalayak.

Agar persoalan dapat diminimalisir maka lahirlah sebuah konsep good university governance (GUG) atau dapat kita sebut sebagai aturan mengurus akademi besar yang bagus. *good university governance* (GUG) adalah sebuah gagasan konsep untuk meningkatkan

mutu perguruan tinggi agar menjadi akademi besar yang bagus. sesuai tujuan. Buat menciptakan semua itu, dibentuklah aturan dengan berpegang pada konsep dari prinsip-prinsip *good university governance* (GUG) yang diturunkan dari prinsip *good governance*.

Bentuk peningkatan tata kelola perguruan tinggi salah satunya dapat diidentifikasi dari status kelebagaannya. Melakukan transformasi kelembagaan terkhusus perguruan tinggi negeri (PTN) merupakan bentuk positif dalam upaya mengoptimalkan pencapaian visi dan misi. Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) bertransformasi sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) adalah bentuk perubahan status kelembagaan perguruan tinggi dengan kategori adanya peningkatan.

Universitas Negara Padang (UNP) merupakan salah satu akademi tinggi negara yang telah melakukan transformasi status kelembagaan dari PTN BLU menjadi PTN BH tepat pada tanggal 25 November 2021 di usia yang ke 67 tahun. UNP sebagai perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa yang terbilang banyak faktor-faktor pendukung dan penghambat akan senantiasa mempengaruhi keterlaksanaan tata kelola. Faktor-faktor ini akan memberikan pengaruh langsung terhadap tingkat capaian pelaksanaan tata kelola UNP. Adapun faktor yang mempengaruhi tata kelola UNP dapat dikategorikan 2 (dua) faktor yaitu faktor pendukung; serta faktor penghambataturan mengurus dalam usaha menggapai *good university governance* (GUG). Mencapai *good university governance* (GUG) di UNP harus didasarkan pada bagaimana implementasi prinsip-prinsip *good university governance* (GUG). Pelaksanaan prinsip-prinsip ini dalam pengelolaannya ini yang dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, dilakukan dengan menuturkan; menggambarkan; dan menafsirkan suatu kondisi ataupun insiden begitu juga terdapatnya alhasil pendekatan yang sangat pas buat dipakai dalam riset ini yakni dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Rasionalisasi peneliti menggunakan metode kualitatif dikarenakan permasalahan yang bersifat fenomenologisme dan realitas ganda. Sidik, U., dan Choiri, M.M (2019) menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menghasilkan penemuan-penemuannya tidak dapat dicapai menggunakan cara kuantitatif maupun prosedur statistik. Penelitian kualitatif mampu menunjukkan, kehidupan masyarakat; fungsionalisme organisasi; tingkah laku; pergerakan sosial; sejarah; hingga hubungan kekerabatan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang nantinya akan menjelaskan fakta dalam bentuk gambar atau kata dan data yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan. Lokasi penelitian dilakukan di UNP. Pemilihan lokus ini dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pengamatan penulis yang mengacu dari dua aspek yang saling berkaitan, pertama secara kelembagaan, dan yang kedua kedua secara sistem, strategi, dan model kepemimpinan, capaian UNP dalam mewujudkan visi dan misi menjadi indikasi bagaimana tata kelolanya.

Purposive Sampling peneliti jadikan sebagai teknik dalam menentukan Informan penelitian, yaitu pertimbangan tertentu, dipandang bisa secara maksimal memberikan data dalam menentukan informasi. Adapun informan dalam penelitian ini berasal dari internal UNP yang dianggap dapat memberikan informasi terkait tata kelola UNP, yakni Majelis Wali Amanat, Senat Akademik Universitas, Tim Reformasi Birokrasi, Rektor,

Wakil Rektor II dan IV UNP, Dekan FE, Wakil Dekan II FIS, Ketua Jurusan Sosiologi, Dosen Sejarah, hingga mahasiswa lintas fakultas. Waktu riset ini dicoba dengan lama sepanjang 6 (enam) bulan semenjak peneliti melakukan observasi awal.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan informasi yang periset gunakan melalui tiga teknik, yaitu metode pemantauan (observasi); teknik tanya jawab (wawancara); dan metode pemilihan (dokumentsi). Analisis data yang dilakukan melalui langkah-langkah yang terdiri dari tahap inventarisasi data (tahap wawancara, perekaman, tahap pengamatan, pencatatan, dan transkripsi), tahap analisis atau klarifikasi data, tahap pembahasan serta penyimpulan hasil analisis atau klasifikasi data serta terakhir tahap pelaporan. Alasannya, data yang diperoleh ialah data dari berbagai sumber oleh karena itu, teknik triangulasi sumber teknik adalah paling sesuai dengan penelitian ini, jadi buat mencoba kesahan informasi, periset memakai metode triangulasi pangkal (sumber).

Hasil dan Pembahasan

Faktor pendukung dan penghambat tata kelola Universitas Negeri Padang dalam mencapai *good university governance* (GUG) untuk melakukan transformasi status PTN BLU menjadi PTN BH

a. Faktor Pendukung

Adapun penjabaran analisis faktor-faktor pendukung pelaksanaan aturan mengurus UNP dalam menggapai *good university governance* (GUG) untuk melakukan transformasi status PTN BLU menjadi PTN BH yang peneliti temukan di lapangan. Berdasarkan temuan penulis di lapangan ada beberapa faktor pendukung yang saling berkaitan dalam tata kelola UNP diantaranya: sistem, modal, dan mutu akademik.

Menurut Hutahaean, J (2014: 2) dari prosedur- prosedur yang silih berkaitan ialah sesuatu jaringan kegiatan yang terkumpul bersama- sama dalam melaksanakan aktivitas serta atau ataupun melaksanakan target khusus diarikan selaku sistem. Sistem dapat dikatakan baik apabila memiliki komponen saling berinteraksi serta bertugas serupa membuat satu kesatuan terkini; area luar sistem pula batas sistem; penghubung sistem; masukan sistem (input); keluaran sistem (output); pengolah sistem; dan target sistem. .

Menurut Pradana, M (2016) sistem diartikan sebagai cara mencapai suatu tujuan yang sama, terdiri dari sekumpulan elemen saling terkait dan terpadu. Apabila kita telaah secara teoritis tata kelola UNP, sistem tata kelola adalah elemen penting yang sangat jelas untuk tingkatan aturan mengurus UNP dalam menggapai *good university governance* untuk melakukan transformasi PTN BLU menjadi PTN BH.

Sistem tata kelola yang dijalankan oleh UNP juga dilirik dari bagaimana sistem informasi dalam pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh UNP. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Prof. Ganefri, Ph.D (Rektor), Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi Prof. Dr. Yasri, MS, Ridho Bayu Yefterson, S.Pd., M.Pd (Dosen Sejarah UNP), Ketua Jurusan Sosiologi Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si , Dekan Fakultas Ekonomi Dr. H. Idris, M.Si, Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan Prof. Ir. Syahril, M.Sc, Ph.D, Wakil Dekan II FIS Dr. Ahmad Rivauzi, S.Pdi, M.A, Pakar



Good Governance Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D yang sekaligus Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Humas UNP, M Hafiz Al Habsy (Mahasiswa FIS), serta Husnul Khatmi (Mahasiswi FMIPA). Setidaknya ada 12 sistem smart campus yang dimiliki UNP, memberi pengaruh besar terhadap tata kelola UNP dalam mencapai *good university governance* untuk melakukan transformasi PTN BLU menjadi PTN BH.

Menjalankan sistem tata kelola pada setiap kegiatan tidak akan terlepas dari modal yang dimiliki oleh institusi publik. Modal adalah faktor utama yang menjadi penentu bagaimana kemungkinan pencapaian tujuan. Secara umum modal merupakan dasar atau bekal sebagai pokok untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya modal dibagi menjadi modal sendiri; serta modal asing dan/atau hutang instansi publik (Riyanto, 2001:227).

Dalam konteks tata kelola sebagai institusi publik UNP memiliki dana berupa aset yang dimiliki oleh UNP disamping dana dari pemerintahan. Selain itu untuk meningkatkan tata kelola terutama dalam peningkatan pendapatan UNP dilakukan dengan adanya investasi. Pada lain hal, pelaksanaan kerja sama dilakukan UNP bersama mitra juga merupakan modal untuk meningkatkan tata kelola. Modal dan sistem yang dimiliki oleh UNP dalam menjalankan tata kelola akan berbanding lurus pada peningkatan mutu akademik UNP dalam mencapai *good university governance* untuk melakukan transformasi PTN BLU menjadi PTN BH.

b. Faktor Penghambat

1) Sumber Daya Manusia

Mewujudkan suatu tujuan organisasi (badan) pada dasarnya dimaksud selaku kegiatan serupa antara 2 orang ataupun lebih. Kumpulan orang diartikan sebagai organisasi, adanya sistem sosial dan sistem kerja sama antara banyak orang tersebut ataupun terdapatnya metode pembagian kegiatan . Menurut Samsuni (2017) sumber Daya Manusia pangkal Energi Orang merupakan masyarakat yang sedia dan mampu membagikan donasi pada upaya dalam menggapai tujuan badan. Konsep tenaga kerja bisa disejajarkan bersama konsep sumber daya manusia yakni bukan angkatan kerja serta angkatan kerja.

Manajemen sumber daya manusia dengan berpijak pada pendekatan sistem organisasi yaitu bagian lebih besar dari sebuah sistem. Berdasarkan produktifitas organisasi dan kontribusinya hendak dievaluasi usaha sumber daya manusia. Model sumber daya manusia dalam praktiknya merupakan terbentuk atas bagian-bagian sebuah sistem terbuka yang saling terikat.

Sebagai salah satu di antara pangkal energi yang terdapat sumber daya manusia pada organisasi untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi memegang peranan penting. Keahlian pangkal energi orang buat melaksanakan kewajiban serta fungsi sangat mentukan berhasil atau tidaknya, dalam setiap aktifitas manusia berorganisasi senantiasa berperan aktif juga selalu dominan, karena manusia pelaku perencana sekaligus sebagai penentu terwujud atau tidaknya tujuan organisasi.

Dengan kondisi SDM UNP untuk menjalankan pengelolaan yang lebih efektif

dan efisien dalam menjalankan tata kelola masih belum mencukupi. Perolehan penulis sesuai wawancara di lapangan bersama informan memperlihatkan bahwa kualitas SDM yang menjalankan pengelolaan masih belum sepenuhnya efektif sehingga berpengaruh terhadap tata kelola.

2) Budaya

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan implementasi budaya kerja yang terdapat di UNP pada beberapa aspek masih belum berorientasi pada tata kelola yang profesional dan tata kelola perguruan tinggi yang berkelas dunia sehingga memberi pengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan aturan mengurus UNP dalam menggapai *good university governance*.

Agar dapat mencapai keberhasilan implementasi budaya kerja mensyaratkan agar implementor budaya kerja yang berintegritas, kreatif dan inovatif, inisiatif, pembelajaran, meritokrasi, dan tanpa pamrih yang tertanam pada civitas akademika belum sepenuhnya berorientasi pada tata kelola yang profesional.

Sesuai hasil wawancara penulis, ditarik kesimpulan bahwa budaya kerja yang diterapkan oleh sebagian pihak pada pelaksanaan tata kelola masih kurang sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan aturan mengurus UNP dalam menggapai *good university governance* (GUG).

Simpulan

Pelaksanaan tata kelola di UNP pada dasarnya untuk menjalankan dan mencapai tujuan pengelolaan tidak memiliki faktor penghambat yang begitu besar. Hanya hal-hal dasar, namun dalam pelaksanaannya di UNP masih belum dikelola secara maksimal sehingga memberi pengaruh yang besar terhadap aturan mengurus UNP dalam menggapai *good university governance* (GUG). Namun, untuk melakukan transformasi status kelembagaan adalah hal wajar UNP mampu mencapai status kelembagaan menjadi PTN BH dengan faktor pendukung yang dimiliki namun faktor penghambat yang pada dasarnya tidak begitu besar dalam menjalankan tata kelola.

Daftar Rujukan

- Hutahaean, J. (2014) Kosep Sistem Informas. Yogyakarta: Deepublish
- Pradana, M (2016). Perencanaan Skema Sistem Informasi Untuk Aktivitas Manajemen. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 4, Pp. 65-71.
- Riyanto, Bambang. 2001. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. Yogyakarta: BPF.
- Samsuni (2017) Manajemen Sumber Daya Manusia. Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan. Volume 17, Pp.113-124.

Suti, M., Syahdi, MZ., dan D., Didiharyono. (2020). Tata Kelola Perguruan Tinggi dalam Era Teknologi Informasi dan Digitalisasi. JEMMA (Jurnal of Economic, Management, and Accounting), Volume 3, Nomor 2, Pp.203-214.

Undang Undang Nomor 114 tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Padang

Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Wisnumurti, AAGO. (2017). Tata Kelola Perguruan Tinggi Swasta Menuju Persaingan Global. Prosiding Seminar : Revitalisasi Tata Kelola Perguruan Tinggi, Pp.1-12.

Zulfikar, A. (2017). Dampak Komersialisasi Pendidikan Terhadap Tata Kelola Pendidikan Tinggi Di Indonesia. Prosiding Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.